



Unsur Politik dalam Kebijakan Sekolah Gratis

Muhammad Wahyu Ilhami^{*1}, Muhammad Sirozi²

^{1,2}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: 23052160009_uin@radenfatah.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-02	This study aims to determine the political elements in the implementation of the free school program in South Sumatra province. In addition, this research also aims to see how the implementation of the free school program along with its benefits and challenges. This research uses a qualitative research method with a literature study research type. The results of this study show that the free school program was first launched during the New Order era. The free school program has brought positive and negative impacts. Free schools are able to provide educational opportunities for underprivileged children. The free school program has become a program that contains strong political elements in order to increase the electability of regional head candidates. The “free school” jargon was presented by Alex Noerdin during the 2008 regional elections, which he also won. Apart from these political elements, the free school program has brought many benefits to the community so that the free school program is not just a campaign promise, but the program has been implemented in the province of South Sumatra.
Keywords: <i>Free School;</i> <i>Politics of Education;</i> <i>South Sumatra.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-02	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur politis dalam pelaksanaan program sekolah gratis di provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program sekolah gratis beserta manfaat dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program sekolah gratis pertama kali dicanangkan pada masa orde baru. Program sekolah gratis telah membawa dampak positif dan dampak negatif. Sekolah gratis mampu memberikan peluang dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Program sekolah gratis telah menjadi program yang mengandung unsur politis yang kuat dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah. Jargon “sekolah gratis” telah dibawakan oleh Alex Noerdin saat Pilkada tahun 2008 yang juga dimenangkan olehnya. Terlepas dari unsur politis tersebut, program sekolah gratis telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat sehingga program sekolah gratis tidak hanya sekedar janji kampanye saja, namun program tersebut telah diimplementasikan di provinsi Sumatera Selatan.
Kata kunci: <i>Sekolah Gratis;</i> <i>Politik Pendidikan;</i> <i>Sumatera Selatan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Budaya politik menyentuh seluruh sektor pembangunan yang ada di sebuah Negara termasuk Negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai contoh ialah politik pendidikan, Negara Indonesia mengalami fase revolusi yang signifikan seperti pemakaian teknologi secara komprehensif, sistem belajar yang bertransisi ke dunia *online*. Konteksnya, pendidikan bersifat dinamis, serta tak dapat dimungkiri bahwa, dunia pendidikan saat ini akan lebih fleksibel dan mudah sehingga dapat meningkatkan mutu intelektual siswa bahkan masyarakat umum. Pendidikan adalah bersifat universal bagi kehidupan individu yang mana secara tidak langsung akan memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa, pendidikan juga menjadi tolak

ukur dalam melihat kualitas dan kuantitas dari individu itu sendiri. (Ahmad & Weyai, 2021, hal. hlm.38)

Upaya pemerataan pendidikan dengan kebijakan politik sekolah gratis, beasiswa anak berprestasi, dan beasiswa anak tidak mampu merupakan wasiat bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi, “*Mencerdaskan kehidupan bangsa*” sekaligus *action* pemerintah dalam menyikapi biaya pendidikan yang semakin mahal dari tahun ke tahun. Namun tidak dipungkiri dibalik program pendidikan gratis ada isu politik, bahkan beberapa provinsi sudah menjadi isu utama pembicaraan, seperti Sumatera Selatan, kebijakan sekolah gratis sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Sumsel Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumsel Tahun 2022 tentang penetapan besaran biaya dan sekolah penerima program sekolah gratis (2022).

Program sekolah gratis di Sumatera Selatan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh kepada semua anak, tanpa memandang status ekonomi keluarga mereka. Selain biaya pendidikan yang makin mahal, angka putus sekolah yang tinggi juga menjadi alasan pemerintah untuk meringankan biaya sekolah dengan harapan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan (Rahman & Nasihin, 2020).

Pendidikan gratis atau sekolah gratis ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya peserta didik/orang tua/ sekolah dibebaskan selama proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Seperti pemberian dana BOS yang merupakan bantuan yang diberikan kepada lembaga sekolah dan pemberian beasiswa yang mana pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada personal yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang sedang diikuti pada jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (Rolos, Posumah, & Londa, 2022). Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya menghadirkan sekolah gratis saja namun juga memperhatikan kualitas pendidikan, karena pemberian kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang tidak hanya baik dan pintar tetapi *excellent* di bidangnya. Seperti pemberian anggaran yang merata baik sekolah negeri maupun sekolah swasta sebagai contoh sekolah SMA Negeri 1 Pagar Alam dan sekolah-sekolah lainnya (Utami & Mahmudin, 2023).

Berdasarkan hasil penilaian awal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Politik Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat unsur politik dalam kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah gratis atau benar-benar murni untuk memperbaiki pendidikan kualitas pendidikan agar dapat mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan

merupakan serangkaian Tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka. (Wibowo, 2019) Studi pustaka studi teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan norma, nilai dan budaya yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti (Fitriana, 2020). Kelebihan dari studi pustaka adalah dapat memudahkan peneliti untuk menemukan data atau bahan yang peneliti cari, dengan tersedianya lingkungan yang cukup, penelitian dengan metode pustaka cenderung dapat meningkatkan fokus, dan metode ini juga dapat membantu peneliti menghindari gangguan yang mungkin ditemui dengan metode penelitian lainnya (arikunto, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meski sudah lama merdeka, pendidikan masih dianggap hal mewah bagi sebagian masyarakat Indonesia yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Tingginya biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, adalah salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Biaya langsung termasuk iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis, dan biaya lainnya, dan biaya tidak langsung termasuk transportasi, biaya kursus, uang saku, dan biaya lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada seluruh siswa di tingkat pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS, dan satuan pendidikan yang sederajat (Sadubun, Tuanaya, & Latuconsina, 2022).

Sejak tahun 2005, semua siswa di seluruh Indonesia menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Ini disebabkan oleh pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dan penuntasan wajar 9 tahun, yang menyebabkan pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan, termasuk BOS. Oleh karena itu, karena dana BOS sudah mencukupi, pendidikan sudah dapat dianggap gratis untuk anak-anak SD. Sehingga iuran sekolah SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan), yang dikelola oleh Komite Sekolah, tidak lagi ditarik sejak tahun 2005 (Sadubun et al., 2022).

Pelaksanaan program sekolah gratis oleh pemerintah, berdasarkan otonomi daerah saat ini, adalah salah satu cara untuk mencapai perbaikan dalam bidang pendidikan. hal yang

dilakukan dalam program ini patut diacungi jempol. Ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan di berbagai daerah, meskipun penuh dengan kritik. Diharapkan bahwa kebijakan pendidikan gratis akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, memenuhi hak pendidikan, dan memungkinkan terlaksananya program wajib belajar (Sadubun et al., 2022).

Dalam mempelajari praktik sekolah gratis, ada dua perspektif. Yang pertama adalah bahwa sekolah gratis bersifat fungsional, yang berarti program tersebut memiliki manfaat. Kebijakan sekolah gratis dibuat dengan alasan yang baik. Salah satu tujuan dari sekolah gratis adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri dan memberi setiap orang kesempatan untuk mengakses pendidikan yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, sekolah gratis diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan. Kedua, hubungan yang ada di antara subsistem sekolah gratis termasuk sistem kecil dalam masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan kebijakan sekolah gratis ini dipengaruhi oleh elemen lain dalam masyarakat. Misalnya, kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan ini, kesiapan sekolah dalam memanfaatkan dana BOS, termasuk memastikan bahwa penggunaan BOS transparan, dan kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terkait dengan penggunaan BOS (Nanang, 2015).

Pendidikan gratis bertujuan untuk (1) meningkatkan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan lulusan, (3) meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global, dan (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi standar dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul. (Sadubun et al., 2022). Selanjutnya, penting untuk memahami bagaimana sejarah dan latar belakang, kebijakan pemerintah, manfaat serta tantangan dari program sekolah gratis sebagai berikut:

A. Sejarah dan Latar Belakang Sekolah Gratis

Sejarah dari program sekolah gratis tidak lepas kaitannya dari program wajib belajar dari pemerintah. Secara umum, wajib belajar berarti bahwa setiap warga negara harus mendidik anaknya pada usia tertentu di jenjang persekolahan tertentu. Undang-undang Wajib Belajar mengatur pelaksanaan

wajib belajar. Undang-undang ini mengatur kewajiban dan hak setiap warga negara terhadap kewajiban belajar, serta sanksi dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh warga negara yang tidak melakukannya. Dalam suatu negara yang menerapkan wajib belajar di tingkat sekolah dasar, misalnya, setiap anak yang berusia 6 tahun atau 7 sampai 12 tahun diwajibkan untuk bersekolah di sekolah dasar. Jika wajib belajar diperpanjang hingga tingkat SMP, setiap anak yang berusia 6 tahun atau 7 sampai 14 tahun atau lebih diwajibkan untuk bersekolah di SMP. (Cahyaningsih, 2016).

Menurut Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, wajib belajar adalah program pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Pemerintah mencoba meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua orang di Indonesia untuk belajar di sekolah. Ini adalah ide yang sangat cerdas karena tujuan pemerintah adalah untuk mendorong rakyat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. (Cahyaningsih, 2016). Seiring dengan diterapkannya wajib belajar, maka secara otomatis biaya pendidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah. Sekolah gratis pertama kali dimulai di Indonesia pada tahun 1984, beriringan dengan diperkenalkannya Gerakan Wajib Belajar masa Orde Baru. Tujuan gerakan ini adalah untuk meningkatkan angkatan kerja di Indonesia dengan meningkatkan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Oleh karena itu, siswa dapat mencapai kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan makna hidup. (Naibaho, Simbolon, Simbolon, & Manik, 2022).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program sekolah gratis berawal dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah masa orde baru. Kebijakan wajib belajar yang saat itu dimulai dari wajib belajar 6 tahun, kemudian menjadi 9 tahun, hingga saat ini menjadi 12 tahun. Wajib belajar merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin maju dan menjadikan rakyat Indonesia yang modern dan berpengetahuan IPTEK yang baik.

B. Kebijakan Pemerintah

Adapun yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan sekolah gratis adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31: Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 34 menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2022: pasal 80 dan 81 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

Ketiga dasar hukum tersebut yang menjadi landasan bagi pemerintah agar mampu menyelenggarakan pendidikan gratis, terkhusus pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan atau sekolah harus dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin. Penyelenggaraan sekolah gratis merupakan bentuk komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya, dalam implementasi sekolah gratis di daerah, terkhusus di Sumatera Selatan, telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2019: Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, termasuk ketentuan umum, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta pendanaan kependidikan (2019). Berdasarkan Perda tersebut, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KPTS/DISDIK/2022 yang mengatur terkait penetapan besaran biaya program sekolah gratis, kemudian menentukan sekolah mana saja yang menjadi penerima program sekolah gratis. Peraturan ini juga mengatur tentang pemberian hibah dalam rangka program sekolah gratis kepada SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa (SLB), serta Madrasah Aliyah negeri dan swasta. Pada peraturan ini juga mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2022

yang berkaitan dengan program sekolah gratis (2022).

Penyelenggaraan program sekolah gratis membuka peluang bagi masyarakat kelas bawah agar dapat merasakan pendidikan yang berkualitas. Istilah "*education for all*" atau pendidikan menyeluruh akan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Artinya tidak hanya orang-orang yang memiliki uang yang dapat menikmati Pendidikan melainkan juga semua level masyarakat termasuk yang tidak mampu akan merasakan nikmatnya program Pendidikan (Usman, Sauri, & Fath, 2022). Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah terkait implementasi Program Sekolah Gratis di provinsi ini: (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2023)

1. Pembebasan Biaya Pendidikan: Kebijakan ini mencakup pembebasan seluruh biaya operasional sekolah bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA. Hal ini termasuk biaya SPP, buku, seragam, dan biaya ekstrakurikuler.
2. Penganggaran Dana APBD: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program sekolah gratis. Alokasi dana ini digunakan untuk menutupi biaya operasional sekolah yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua siswa.
3. Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Selain dari APBD, pemerintah juga memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat. Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional sekolah seperti gaji guru honorer, perawatan fasilitas sekolah, dan kegiatan pembelajaran.
4. Kerjasama dengan Sektor Swasta: Pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga donor, untuk mendukung pendanaan dan juga fasilitas pendidikan. Kerjasama ini membantu mengurangi beban finansial pemerintah daerah.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan, pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Monitoring ini mencakup pemeriksaan terhadap penggunaan dana, kualitas pendidikan, dan kepuasan masyarakat.
6. Pelatihan dan Pengembangan Guru: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan

kualitas pendidikan, pemerintah juga mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru. Ini untuk memastikan bahwa meskipun sekolah gratis, kualitas pendidikan tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan.

7. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas untuk mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang memadai menjadi fokus utama.

Berdasarkan uraian diatas, provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan besarnya komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan "education for all" untuk semua lapisan masyarakat dengan mengatur penganggaran APBD, pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SD sampai SMA, penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana, PPG, bantuan berupa BOS atau subsidi bantuan operasional sekolah, dan kerjasama dengan sektor sekolah-sekolah swasta maupun negeri.

C. Dampak Sekolah Gratis

Pendidikan gratis dapat berdampak positif pada pencapaian tujuan nasional, termasuk:

1. Mampu memberi anak-anak yang kurang mampu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan angan-angan mereka. Pendidikan yang sebelumnya tidak bisa diakses oleh kalangan menengah ke bawah dikarenakan biayanya yang mahal, melalui program sekolah gratis menjadikan mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga membuka peluang mereka kelak untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya.
2. Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya. Program sekolah gratis dapat meningkatkan mutu pendidikan, dikarenakan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pendidikan, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka, dan berdampak kepada mutu pendidikan yang lebih baik.
3. Memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran dan kemiskinan. Melalui sekolah gratis, masyarakat kelas bawah dapat menerima pendidikan yang baik, sehingga menambah pengetahuan mereka, dapat bekerja di

tempat yang lebih layak, dan mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

4. Mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, yang dididik dengan pendidikan yang baik dan dapat diakses oleh semua, maka akan dapat menghasilkan SDM-SDM unggul yang dapat berkontribusi untuk bangsa.
5. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan generasi muda. Cita-cita nasional tersebut dapat dicapai melalui program sekolah gratis, karena pendidikan gratis dapat diakses oleh orang-orang dari berbagai *background*.

Namun, kebijakan sekolah gratis juga memiliki dampak negatif, diantaranya: (Suyahman, 2016)

1. Dengan program sekolah gratis, masyarakat yang masih awam akan berpikiran bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SMA saja, padahal pendidikan tinggi juga penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasi, sehingga ada kemungkinan bahwa sekolah yang tidak bertanggung jawab akan menyalahgunakannya. Misalnya, siswa mungkin harus membeli buku pelajaran, LKS, dan bimbel, yang akhirnya tidak gratis juga.
3. Menimbulkan beberapa siswa dapat bertindak sesuka mereka dalam hal pendidikan dan pembiayaan. Hal ini disebabkan dikarenakan sebagian peserta didik merasa tidak mengeluarkan atau mengorbankan apa pun dalam proses pendidikan, sehingga menimbulkan perilaku seenaknya tersebut.
4. Keteteran akan terjadi jika sekolah memerlukan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendesak. Hal ini disebabkan karena terlalu sulitnya proses birokrasi di pemerintahan yang menyebabkan sekolah yang ingin mengajukan permintaan dana, harus mendapatkan beberapa persetujuan terlebih dahulu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program sekolah gratis telah membawa dampak positif dan dampak negatif. Sekolah gratis mampu memberikan peluang dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang

mampu, meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan cita-cita Nasional dan lain-lain. Namun, program sekolah gratis juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan dana, peserta didik yang bersifat sesukanya, dan lain sebagainya.

D. Unsur Politik dalam Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Sumatera Selatan

Amandemen UUD 1445 mengamanahkan bangsa Indonesia harus menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi dari amanah itu ialah dengan beberapa kebijakan seperti program sekolah gratis, beasiswa, dana bos dan wajib belajar selama 9 tahun yang kemudian diubah menjadi 12 tahun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan (Tintington, Lumapow, & Rotty, 2023). Pemerintah kabupaten dan juga provinsi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, baik di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Rolos et al., 2022).

Ada banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh daerah atau disebut dengan Perda mengenai program pendidikan gratis, banyak pula oknum-oknum yang hanya menjadikan sekolah gratis sebagai jargon dan isu politik dalam memenangkan kontes politik, salah satu provinsi yang menjadi isu utama pembicaraan, ialah di Sumatera Selatan, menurut Ade yang dikutip dari jurnal yang berjudul "Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan?" karya Abdul Rahman dan Ahmad Nasihin (Rahman & Nasihin, 2020). Sejatinya, jargon "sekolah gratis" merupakan jargon kampanye yang dibawa oleh Calon Gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada tahun 2008. Selama kampanye Pilkada Sumatera Selatan pada tahun 2008, Alex Noerdin dan pasangannya Eddy Yusuf menggunakan jargon yang menekankan pada pendidikan dan pengobatan gratis sebagai bagian dari platform mereka. Namun, ini mencerminkan komitmen mereka terhadap peningkatan akses ke layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan (Putri & Persada, 2021). Namun, program sekolah gratis di Sumatera

Selatan, yang diperkenalkan selama masa jabatan Alex Noerdin ketika ia terpilih menjadi Gubernur, memang dapat memiliki dampak pada elektabilitas seorang politisi. Kebijakan publik yang populer seperti program sekolah gratis sering kali meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pejabat yang melaksanakannya. Ini bisa berkontribusi pada peningkatan dukungan politik dan elektabilitas pejabat tersebut (Widyasthika, 2019).

Program sekolah gratis ini juga menjadi salah satu isu kampanye yang dibawa oleh pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya pada Pilkada Sumatera Selatan pada tahun 2018. Selama kampanye Pilkada Sumatera Selatan tahun 2018, Herman Deru memang menyebutkan program sekolah gratis. Herman Deru menyoroti pentingnya melanjutkan dan membenahi program sekolah gratis yang ada, serta menjanjikan bahwa jika terpilih, sekolah akan benar-benar gratis (Hafiz & Tarso, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa program sekolah gratis memang menjadi isu yang dapat menarik perhatian masyarakat pada masa-masa kampanye Pilkada. Walau tidak ada bukti langsung bahwa program sekolah gratis secara eksplisit dirancang untuk meningkatkan elektabilitas, namun pada kenyataannya pasangan calon gubernur di Sumatera Selatan yang mengedepankan program sekolah gratis pada kampanyenya sejak Pilkada tahun 2008 akan menjadi gubernur terpilih dalam kontestasi Pilkada pada tahun yang mereka ikuti.

Walaupun kebijakan sekolah gratis memiliki efek samping dalam meningkatkan elektabilitas, namun program tersebut telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Sumatera Selatan. Manfaat tersebut antara lain adalah peningkatan kualitas pembangunan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, peningkatan akses ke layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar (Wahyuni, 2021). Jadi, dapat disimpulkan bahwa program sekolah gratis telah menjadi program yang mengandung unsur politis yang kuat dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah. Jargon "sekolah gratis" telah dibawa oleh Alex Noerdin saat Pilkada tahun 2008 yang juga dimenangkan olehnya. Selain itu juga isu sekolah gratis juga kembali dibawa saat kampanye Herman

Deru-Mawardi Yahya pada kontestasi Pilkada 2018 yang juga dimenangkan olehnya. Terlepas dari unsur politis tersebut, program sekolah gratis telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat sehingga program sekolah gratis tidak hanya sekedar janji kampanye saja, namun program tersebut telah diimplementasikan di provinsi Sumatera selatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Program sekolah gratis berawal dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah masa orde baru. Kebijakan wajib belajar yang saat itu dimulai dari wajib belajar 6 tahun, kemudian menjadi 9 tahun, hingga saat ini menjadi 12 tahun. Wajib belajar merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin maju dan menjadikan rakyat Indonesia yang modern dan berpengetahuan IPTEK yang baik. provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan besarnya komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan "education for all" untuk semua lapisan masyarakat dengan mengatur penganggaran APBD, pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SD sampai SMA, penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana, PPG, bantuan berupa BOS atau subsidi bantuan operasional sekolah, dan kerjasama dengan sektor sekolah-sekolah swasta maupun negeri.

Program sekolah gratis telah membawa dampak positif dan dampak negatif. Sekolah gratis mampu memberikan peluang dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan cita-cita Nasional dan lain-lain. Namun, program sekolah gratis juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan dana, peserta didik yang bersifat sesukanya, dan lain sebagainya. Program sekolah gratis telah menjadi program yang mengandung unsur politis yang kuat dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah. Jargon "sekolah gratis" telah dibawakan oleh Alex Noerdin saat Pilkada tahun 2008 yang juga dimenangkan olehnya. Selain itu juga isu sekolah gratis juga kembali dibawakan saat kampanye Herman Deru-Mawardi Yahya pada kontestasi Pilkada 2018 yang juga dimenangkan olehnya. Terlepas dari unsur

politis tersebut, program sekolah gratis telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat sehingga program sekolah gratis tidak hanya sekedar janji kampanye saja, namun program tersebut telah diimplementasikan di provinsi Sumatera selatan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Unsur Politik dalam Kebijakan Sekolah Gratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, B., & Weyai, S. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1, 37–43.
- Arikunto. (2006). *Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi*. Rake Sarasin. Syiah Kuala University Press. Diambil dari http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Metodologi-Penelitian_k1_restu.pdf
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979–989.
- Fitriana, D. (2020). Hakikat Dasar Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 143–150. Diambil dari <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/tarbawy.v7i2.1322>
- Hafiz, A., & Tarso. (2018). Herman Deru: Saya Jadi Gubernur, Sekolah Benar-benar Gratis. Berobat Cukup Bawa KTP.
- Naibaho, T., Simbolon, S. A., Simbolon, E. G., Simbolon, M., & Manik, H. N. (2022). Bimbingan Belajar Gratis SD Negeri 24 Tanjung Bunga. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 862–866. Diambil dari <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.5494>
- Nanang, M. (2015). Perspektif Konflik Mengenai Sekolah Gratis Atau Sekolah Dibantu Bos : *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 248–253.

- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KPTS/DISDIK/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya dan Penerima Program Sekolah Gratis Serta Hibah Program Sekolah Gratis Kepada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Serta Madrasah.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Laporan Tahunan Program Sekolah Gratis. Palembang: Pemprov Sumatera Selatan.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan.
- Putri, B. U., & Persada, S. (2021). Jejak Politik Alex Noerdin, Berawal dari PNS Sampai Jadi Anggota DPR.
- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102–116. Diambil dari <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>
- Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VIII(113), 1–11.
- Sadubun, J. A., Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2022). Implementasi Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 69–76. Diambil dari <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page69-76>
- Suyahman. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047–1054.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. Diambil dari <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Usman, D. H., Sauri, S., & Fath, A. F. (2022). Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan di Pesantren Fath. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 589–600. Diambil dari <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>
- Utami, L. K., & Mahmudin, A. S. (2023). Dampak Sekolah Gratis terhadap Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Pagar Alam. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1), 337–343. Diambil dari <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.807>
- Wahyuni, T. (2021). Sekolah Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia (Studi di Kota Blitar, Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(5), 1–8.
- Wibowo, A. (2019). Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan. *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 85–103. Diambil dari <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i2.971>
- Widyasthika, H. F. (2019). Sekolah Gratis untuk Semua: Meninjau Implementasi Program Pendidikan di Sumatera Selatan.